

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian mengenai arahan pengembangan lokasi agroindustri berdasarkan komoditas unggulan di Kabupaten Wonosobo dapat disimpulkan sebagai berikut, sesuai dengan sasaran penelitian yang telah ditetapkan yaitu:

1. Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift share Analysis* (SSA) melalui pendekatan Penentuan Komoditas Unggulan terhadap 42 komoditas pertanian di Kabupaten Wonosobo mengidentifikasi tujuh komoditas unggulan, yaitu ubi jalar, ubi kayu, kentang, kubis, tomat, labu siam, dan kakao. Ketujuh komoditas tersebut merupakan komoditas basis dengan nilai $LQ > 1$ sekaligus memiliki pertumbuhan progresif dengan $PB > 0$, sehingga secara ekonomi wilayah maupun daya saing layak dijadikan prioritas utama dalam pengembangan agroindustri di Kabupaten Wonosobo.
2. Hasil analisis kesesuaian lahan berdasarkan 13 variabel fisik dan nonfisik — meliputi jarak terhadap jalan utama, permukiman, pusat kota, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sungai, infrastruktur (terminal dan pasar), kemiringan lereng, jenis tanah, penggunaan lahan, ketenagakerjaan, dan ketersediaan bahan baku — melalui metode union menunjukkan bahwa kesesuaian lahan di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh kelas Cukup Sesuai (S3) seluas 58.969,41 ha atau 58% dari total wilayah, diikuti kelas Kurang Sesuai (N1) sebesar 23%, kelas Sesuai (S2) sebesar 20%, sedangkan kelas Sangat Sesuai (S1) dan Tidak Sesuai (N2) masing-masing hanya sekitar 1% dan kurang dari 1%. Dominasi kelas Cukup Sesuai menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo berpotensi dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, namun masih dibatasi oleh kondisi topografi berlereng, jarak terhadap pusat pelayanan dan infrastruktur, serta pola penggunaan lahan yang belum sepenuhnya mendukung.
3. Hasil analisis ketersediaan lahan menunjukkan bahwa lahan yang belum termanfaatkan secara intensif dan berpotensi dikembangkan untuk agroindustri di Kabupaten Wonosobo seluas 283,04 ha. Ketersediaan lahan terbesar berada di Kecamatan Wadaslintang, yaitu 157,93 ha atau sekitar 55,80% dari total ketersediaan lahan

kabupaten, sedangkan Kecamatan Kalibawang, Sukoharjo, Watumalang, dan Mojotengah tidak memiliki lahan tersedia karena wilayahnya didominasi permukiman, kawasan lindung, maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/LCP2B).

4. Hasil overlay antara lahan yang tersedia dan sesuai secara fisik dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam Pola Ruang RTRW Kabupaten Wonosobo menunjukkan kesesuaian seluas 19,86 ha dari total 220,44 ha KPI yang ditetapkan, yaitu di Kecamatan Leksono seluas 19,64 ha dan Kecamatan Kalikajar seluas 0,22 ha. Hasil ini menunjukkan bahwa keselarasan antara ketersediaan lahan aktual di lapangan dengan alokasi Kawasan Peruntukan Industri dalam RTRW masih sangat terbatas, yaitu kurang dari 10% dari total KPI yang telah ditetapkan serta kesesuaian Ketentuan Umum Zonasi menunjukkan seluas 8,09 ha yaitu di Kecamatan Leksono 7,95 ha dan Kecamatan Kalikajar 0,11 ha.
5. Dengan mempertimbangkan standar luas lahan minimum kawasan industri kecil dan menengah sebesar 5 ha dalam satu hamparan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020, yaitu hamparan seluas 11,73 ha di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan hamparan seluas 31,02 ha pada kawasan yang diperbolehkan secara bersyarat sesuai Ketentuan Umum Zonasi, keduanya berada di Kecamatan Leksono. Kedua lokasi tersebut didukung oleh aksesibilitas dan sarana prasarana yang memadai sehingga direkomendasikan sebagai arahan pengembangan agroindustri berbasis tujuh komoditas unggulan. Sementara itu, seluruh hamparan lahan lainnya, baik di dalam maupun di luar KPI, memiliki luas kurang dari 5 ha sehingga belum memenuhi persyaratan untuk dikembangkan sebagai lokasi agroindustri.

5.2 Rekomendasi/Saran

Mengacu pada hasil penelitian, arahan pengembangan agroindustri di Kabupaten Wonosobo sebaiknya menjadi salah satu pertimbangan bagi Bappeda dan Dinas Perindustrian dalam penyusunan atau revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke depan. Hal ini penting mengingat dari 220,44 ha Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang telah ditetapkan dalam RTRW, ternyata hanya 19,86 ha yang benar-benar sesuai secara fisik dan tersedia untuk dikembangkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi KPI eksisting belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi lahan aktual di lapangan, sehingga perlu dikaji ulang, terutama

dengan melihat peluang di Kecamatan Wadaslintang yang memiliki ketersediaan lahan paling luas namun belum termasuk dalam kawasan peruntukan industri.

Lokasi yang direkomendasikan di Kecamatan Leksono seluas 11,73 hektar masih berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agroindustri. Namun, mengingat luas lahannya terbatas, pengembangan sebaiknya difokuskan pada beberapa komoditas unggulan yang memiliki ketersediaan bahan baku paling tinggi dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data periode tahun 2020–2024, sehingga hasil analisis menggambarkan kondisi pada periode tersebut. Jika Apabila di masa mendatang terjadi perubahan produksi komoditas, kondisi wilayah, maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan agroindustri, maka analisis perlu diperbarui menggunakan data terbaru agar rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.